



Analisis Permasalahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pada Panti Asuhan di Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo

Annisatun Nur Farida¹, Han Tantri Hardini²

^{1,2}Universitas Negeri Surabaya

E-mail: annisatunnf@gmail.com¹, hanhardini@unesa.ac.id²

Article Info

Article history:

Received November 29, 2025
Revised November 30, 2025
Accepted December 07, 2025

Keywords:

Analysis, SPJ Reporting,
Digitalization, Effectiveness,
Social Affairs Office

ABSTRACT

This study aims to analyze the problems in the reporting process of the Accountability Report (SPJ) in orphanages under the Fakmis Division of the Social Service Office. The SPJ reporting process, which is still carried out manually, presents several challenges, including delays in reporting, recording errors, and the need for repeated verification. These issues hinder the effectiveness of employee performance. This study employs a qualitative descriptive method with a case study approach, through direct observation and interviews with staff of the Fakmis Division. From this research, it is hoped that it can add new insights and references for further research.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received November 29, 2025
Revised November 30, 2025
Accepted December 07, 2025

Kata Kunci:

Analisis, Pelaporan SPJ,
Digitalisasi, Efektivitas, Dinas
Sosial

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dalam proses pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Panti Asuhan di Bidang Fakmis Dinas Sosial. Proses pelaporan SPJ yang masih dilakukan secara manual menimbulkan beberapa kendala, diantaranya adalah keterlambatan pelaporan, kesalahan pencatatan, dan diperlukannya verifikasi berulang. Kendala-kendala yang timbul ini menghambat efektivitas kerja pegawai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui observasi langsung dan wawancara dengan pegawai Bidang Fakmis. Dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan baru dan referensi penelitian selanjutnya.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Annisatun Nur Farida
Universitas Negeri Surabaya
Email: annisatunnf@gmail.com

PENDAHULUAN

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) adalah laporan yang memuat rincian anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan. Menurut Ikbal dan Leni (2016), Surat Pertanggungjawaban (SPJ) adalah suatu laporan yang terorganisir memuat paparan penggunaan anggaran dalam



suatu kegiatan. Surat Pertanggungjawaban ini dilampirkan selain untuk menunjukkan transparansi keuangan, melainkan juga bukti kredibilitas penyelenggara kegiatan.

Laporan yang dimuat di dalam SPJ umumnya berisi surat pertanggungjawaban resmi, rincian realisasi anggaran kegiatan, bukti-bukti pembayaran seperti kuitansi dan nota, daftar hadir, dan foto dokumentasi kegiatan. Penggunaan SPJ lumrahnya dipakai untuk kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan dana APBN/APBD, kegiatan perusahaan, dan pelaksanaan acara sosial.

Panti asuhan adalah lembaga kesejahteraan sosial yang menampung, mendidik, membina anak-anak terlantar, yatim-piatu, dan anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (2004), panti asuhan anak merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang bertugas memberikan perawatan dan bantuan kepada anak-anak terlantar. Lembaga ini berperan sebagai pengganti orang tua atau wali dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak asuh, sehingga mereka mendapatkan kesempatan yang layak dan memadai untuk mengembangkan kepribadiannya.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) bertanggung jawab untuk menangani penyaluran dana ke seluruh panti asuhan dan LKSA yang berada di bawah naungan nya. Bidang di Dinas Sosial, P3A yang bertanggungjawab penyaluran dana bantuan dan pengecekan SPJ adalah bidang Fakir Miskin (Fakmis).

Panti asuhan yang menerima bantuan dana dari Dinas Sosial, P3A menyerahkan SPJ dengan periode triwulan untuk dilakukan pengecekan. Bidang Fakmis mengecek SPJ yang diajukan oleh panti asuhan, jika sudah memenuhi persyaratan dapat dilanjutkan ke proses berikutnya. Namun, jika SPJ yang diajukan belum memenuhi persyaratan seperti rincian belanja di realisasi anggaran tidak sesuai dengan nota pembayaran atau tidak ada bukti dokumentasi, bidang Fakmis mengembalikan SPJ ke panti yang mengajukan dan meminta pihak panti untuk melakukan revisi.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka diadakan penelitian mengenai permasalahan SPJ yang diserahkan oleh Panti Asuhan ke pihak Dinas Sosial, P3A. Tujuan penelitian ini menganalisis permasalahan pengecekan SPJ yang dilakukan oleh bidang Fakmis dan memberikan gagasan atas solusi permasalahan yang dialami.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang dipakai untuk memaparkan atau menganalisa suatu kejadian, namun tidak berupaya mencari hubungan kausalitas. Menurut Creswell (2019), metode ini memusatkan pada interpretasi lebih jauh tentang suatu fenomena melalui pengumpulan data misalnya wawancara dan observasi. Menurut Endraswara (2013), metode deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dipilih untuk mengilustrasikan data penelitian melalui kalimat, bukan numerik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada setiap triwulan, pihak panti asuhan menyerahkan SPJ ke pihak Fakmis untuk dilakukan pengecekan. Pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui SPJ yang diserahkan sudah sesuai dengan persyaratan atau belum. Dari semua SPJ yang diserahkan, ada sebagian yang diantaranya masih belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan seperti rincian realisasi anggaran yang belum balance, nota pembayarannya kurang lengkap, dan adanya ketidaksamaan dimana rincian barang yang dibeli di nota, tidak dimasukkan ke dalam rincian realisasi



anggaran. Pengecekan ini dilakukan oleh pegawai Fakmis secara berulang-ulang, sehingga mengakibatkan ketidak efisienan dalam proses pengecekan. Akibat yang timbul dari permasalahan ini adalah proses penyerahan SPJ dari pihak panti menjadi terhambat dan belum bisa melanjutkan ke proses berikutnya.

Dari masalah yang dialami oleh bidang Fakmis di Dinas Sosial, P3A, dapat diusulkan untuk rancangan pembuatan aplikasi E-SPJ. Pembuatan aplikasi E-SPJ ini tidak hanya mengefisiensikan kinerja bidang Fakmis, melainkan juga membantu pihak panti asuhan. Pihak panti asuhan yang awalnya mencetak SPJ dan menyerahkannya secara langsung ke bidang Fakmis, kini dapat menyerahkan SPJ untuk melakukan pengecekan dengan lebih mudah melalui E-SPJ.

Mekanisme Alur Pemakaian E-SPJ

Alur proses penggunaan E-SPJ dilakukan sebagai berikut:

1. Pihak panti asuhan *login* ke dalam aplikasi E-SPJ untuk menyerahkan laporan dengan periode triwulan.
2. Pihak panti asuhan mengisi rincian pengeluaran dari anggaran yang telah diberikan di kolom yang sudah disediakan di aplikasi. Nota pembelian, kuitansi, foto dokumentasi, dan dokumen pendukung lainnya diunggah di kolomnya tersendiri
3. Setelah mengisi semua kolom informasi, pihak panti asuhan memencet tombol submit untuk dikirimkan ke bidang Fakmis.
4. Bidang Fakmis melakukan pengecekan dari laporan yang diunggah dari pihak panti asuhan.
5. Jika laporan yang diserahkan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, pihak panti asuhan dalam melanjutkan ke proses selanjutnya. Namun, jika laporannya masih belum sesuai, contohnya yakni dokumen pendukung yang masih kurang, pihak panti asuhan dapat melakukan revisi secara langsung melalui aplikasi sebelum menyerahkan lagi laporan yang sudah direvisi.

Kendala-kendala yang Timbul dan Solusi

Mengimplementasi sistem E-SPJ tidak lekang dari masalah yang timbulkan. Kendala yang timbul seperti butuhnya waktu bagi pihak panti asuhan dan bidang Fakmis untuk terbiasa dengan sistem pelaporan SPJ yang dilakukan secara digital, kendala jaringan, dan keterbatasan perangkat yang digunakan.

Untuk menanggulangi permasalahan yang timbul, pihak Dinas Sosial, P3A dapat melakukan sosialisasi pengenalan E-SPJ. Melalui sosialisasi ini, pihak panti dapat membantu pihak panti asuhan untuk belajar dan memahami cara kerja sistem E-SPJ. Pengaksesan sistem E-SPJ direncanakan untuk bisa diakses melalui beberapa macam gadget seperti ponsel, tablet, maupun komputer. Hal ini dilakukan supaya pihak panti asuhan maupun pihak Fasmik dapat mengakses aplikasi e-SPJ kapansaja dan dimana saja.

Manfaat Implementasi E-SPJ

Penggunaan E-SPJ memberikan beberapa manfaat, yang diantaranya adalah:

1. Peningkatan efisiensi bidang Fakmis: Melalui penggunaan E-SPJ, karyawan dari bidang Fakmis tidak lagi perlu melakukan cek berulang-ulang. Proses pengecekan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah jika dibandingkan dengan cara metode manual.



2. Memudahkan proses penyerahan SPJ: Pihak panti asuhan tidak perlu repot-repot pergi ke Dinas Sosial, P3A untuk menyerahkan berkas SPJ. Pihak panti hanya perlu menginput data ke dalam E-SPJ, dan pihak bidang Fakmis dapat langsung melakukan pengecekan.
3. Mengurangi risiko adanya kesalahan dalam pencatatan di SPJ: Penggunaan aplikasi yang berbasis digital mengurangi kemungkinan data yang diinput tidak valid dan kesalahan dalam pencatatan. Di dalam E-SPJ, nanti disediakan format tersendiri untuk proses penginputan data-data seperti bukti nota pembelian, realisasi anggaran, bukti dokumentasi, dan sebagainya, sehingga kecil kemungkinan dimana pihak panti asuhan menginput data yang tidak sesuai atau salah.
4. Sistem pengarsipan yang lebih terstruktur: Proses pengarsipan di E-SPJ dapat dilakukan dan diatur lebih terstruktur dengan sistem pengarsipan yang dapat diatur menyesuaikan dengan kebutuhan. Baik pihak panti asuhan dan Dinas Sosial, P3A dapat melihat data maupun SPJ dari periode sebelumnya dengan lebih mudah dan cepat melalui E-SPJ.
5. Keamanan yang dapat terjamin: Melalui E-SPJ, kecil kemungkinan data dari periode sebelumnya menghilang. Semua data yang sudah dimasukkan ke dalam E-SPJ akan disimpan di dalam aplikasi dan dapat diakses kapan saja. Di sisi lain, pihak yang tidak bertanggung jawab tidak bisa melihat data yang ada di E-SPJ karena akses hanya diberikan untuk pihak-pihak yang bertanggungjawab atau terlibat.

KESIMPULAN

TBerdasarkan hasil penelitian yang dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan SPJ di bidang Fakir Miskin di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo masih dilakukan secara manual. Proses yang dilakukan secara manual ini memiliki berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut merinci ketidaksesuaian rincian realisasi anggaran dengan nota pembelian dan perbedaan data yang mengharuskan staf di bidang Fakmis melakukan pengecekan secara repetitif. Kondisi ini mengakibatkan proses verifikasi menjadi tidak efisien dan menghambat ke tahapan administrasi selanjutnya.

Melalui analisis yang dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi pelaporan melalui penerapan aplikasi E-SPJ berpotensi menjadi solusi yang efektif. Penggunaan E-SPJ dapat meningkatkan efisiensi kinerja pegawai Bidang Fakmis, mempermudah panti asuhan dalam mengirimkan laporan, serta meminimalkan risiko kesalahan pencatatan. Selain itu, sistem digital memungkinkan pengarsipan yang lebih terstruktur dan keamanan data yang lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Apriliani, A., Ginaldo, K., & Seran, M. Y. G. (2024). “Adiministrasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)”. *Karimah Tauhid*, 3(1), 673–681.
<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.11627>

Creswell, J. W. (2019). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (Edisi ke-4, Cetakan ke-4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Departemen Sosial Republik Indonesia (2004). Acuan Umum Pelayanan Sosial Anak di Panti Sosial Asuhan Anak. Jakarta: Depertemen Sosial RI



Endraswara, Suwardi. (2013). Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).Endraswara, Suwardi. (2013). Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).

Fauzi, A. (2025). "IMPLEMENTASI PENGERJAAN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ) MEMANFAATKAN GOOGLE FORM DAN GOOGLE SHEETS DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DI KABUPATEN KEDIRI". Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1. <https://jurnal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>

Hakim, I. L., & Fitriani L. (2016). "Perancangan Sistem Informasi Laporan Surat Pertanggungjawaban Belanja Operasional Di Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Banyuresmi". Dalam Jurnal Algoritma STT-Garut Vol. 13 No. 2. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.13-2.239>

Nisa, M. K., Prasetyo, A. S., & Priyastiwi. (2025). "ANALISIS PENGARUH SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SKID) TERHADAP PEMROSESAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) BELANJA DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SLEMAN". Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi) Vol. 5 No 1. Mei 2025, pp 119-126. <https://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB>